



PEMERINTAH KOTA DUMAI

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 khususnya Misi Keempat “*MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL.*”.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 18 September 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KOTA DUMAI
KEPALA,



ZULFAHREN, S.Sos. M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 197601172002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	48
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	57
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	26
Tabel 2.3	Nilai Persepsi, Nilai IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	28
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	32
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	37
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	49
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	51
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
----------	--	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I
BAB I

PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

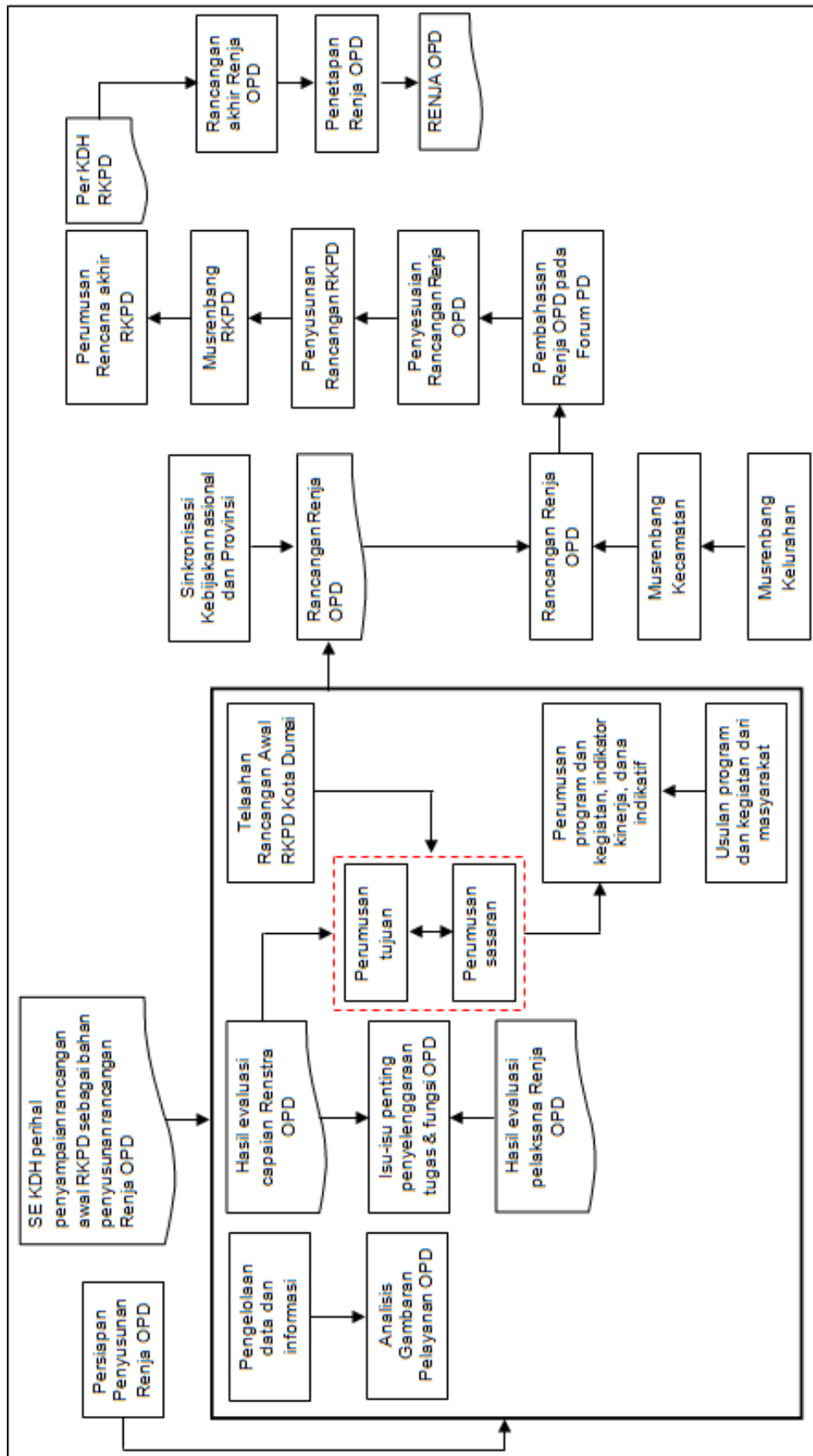
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan merupakan serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Proses/tahapan penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Renja meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu penyusunan rancangan awal Renja ini juga mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru ini diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja ini mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan

Tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah ini merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga Maret kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi rancangan Renja ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda, tujuannya untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum tersebut.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD. Rancangan akhir Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi selambat-lambatnya selama 2 (dua) minggu dalam rangka menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Rancangan akhir Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan

kembali kepada Kepala Bappeda. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program/kegiatan/subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju tahun 2026. Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima Surat Walikota Dumai Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan awal renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah yang difasilitasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Dumai. Rancangan awal Renja disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaiannya dengan rancangan awal RKPD. Jika sudah sesuai, maka rancangan awal Renja yang telah disempurnakan tersebut menjadi Rancangan Renja. Selanjutnya rancangan Renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang RKPD Kota Dumai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Dumai. Rancangan Renja disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Dumai. Rancangan akhir Renja Tahun 2026 disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Jika tidak terdapat saran dan rekomendasi dari hasil verifikasi, maka rancangan akhir Renja ini ditetapkan menjadi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini mempedomani: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (3) Rancangan awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2024-2026; dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Dalam merumuskan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan telaah terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, juga Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka sinkronisasi program pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional. Renja ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk memastikan bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini telah disusun selaras dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2026. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, serta keterkaitan antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2026, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, dengan Renja Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2024.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan (membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan), penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Memuat penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
- Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

Bab ini melampirkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 yang disesuaikan dengan rumusan rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa:

- Catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Pada Tabel 2.1 terlampir rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024, mengacu pada APBD, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024

Tabel TC.29

Tabel TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISURKAPIL S/D TAHUN 2024

KOTA DUMAI

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM(RENSTRA) TAHUN2024	REALISASI TARJEF HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,00	6,00	6,00	6,00	100,00%	6	DOKUMEN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,00	2,00	2,00	DOKUMEN	2,00	1,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKA-SKPD	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	1,00	0,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	1,00	0,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	5,00	2,00	2,00	DOKUMEN	2,00	1,00	100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,00	3 Laporan	3,00	LAPORAN	3	100,00%	3	LAPORAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,00	31,00	12,00	BULAN	12,00	4,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	12,00	1,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (dokumen)	10,00	2,00	1,00	DOKUMEN	1,00		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,00	12 Bulan			12	100,00%	12	BULAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Dukungan pelaksanaan SPHE pada SKPD	1,00	0,00	1,00	APLIKASI	1	0,00	100,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60,00	0,00			1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas-Jabatan (12 Bulan)	60,00	0,00	1,00	UNIT	1	1,00	100,00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	61,00	0,00	2,00	UNIT	2	2,00	100,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	60,00	0,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60,00	12 Bulan			12 BULAN		100,00%	12	BULAN		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,00	3 Jenis			3 JENIS		100,00%	3	JENIS		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	31,00	5,00	6,00	JENIS	6	3,00	100,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (bulan)	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
		Pelayanan Pencatatan Sipil						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		Penyelempangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
		Penyusunan Profil Kependudukan						1 DOKUMEN		100,00%	1	DOKUMEN		
		Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependudukan tersusun	1,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				

Pada Tabel TC.29 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana yang tersaji pada Tabel TC.29 diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi program/kegiatan Rata rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya sampai dengan tahun 2024 diperkirakan memenuhi target kinerja yang direncanakan karena semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dukungan anggaran yang memadai, diantaranya:

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat kegiatan yang realisasinya sampai dengan tahun 2024 melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, serta adanya dukungan anggaran yang memadai. Kinerja dari kegiatan ini sampai dengan tahun

2024 diprediksi memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa factor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja maupun pagu anggaran pada saat penyusunan dokumen Renstra, karena kurangnya pagu anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya. Disisi lain terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihi target kinerja kegiatan yang direncanakan, diantaranya semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, serta adanya dukungan anggaran yang memadai.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana perodesasi selanjutnya agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya.

22 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menyelenggarakan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dinas Dukcapil Kota Dumai Tahun 2024
Sumber: Dinas Dukcapil, 2024,

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISDUKCAPIL
KOTA DUMAI

No	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
		Target tahun 2023	Target tahun 2024	Target tahun 2025	Target Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026	
1	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran
2	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	75%	75%	88%	51,85%	74%	75,00%	88%	terbatasnya anggaran menghambat tercapainya target
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	88	90	90	91	93,05	92,41	90	91	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran
4	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	100%	100%	100%	92,08%	98,15%	100,00%	100%	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna menunjukkan capaian yang meningkat/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sesuai target sebesar 100%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong** capaian indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Konsolidasi Data yang rutin
 - Koordinasi penyampaian hambatan ke dirjen Duk capil Kemendagri yang rutin.
- c. **Faktor penghambat** Capaian Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
- Jumlah Sumber daya yang kurang untuk pengolahan dan koordinasi Data base kependudukan.
- d. **Tindak lanjut** Capaian Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
- Akan terus mempertahankan capaian kinerja.
 - Pengusulan untuk penambahan Sumber Daya baik Manusia maupun Fisik

2. Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 69% realisasi sebesar 51,85% tercapai 75,07% atau bernilai kinerja Sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 40,7% atau tercapai sebesar 74%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 1,07%
- b. **Faktor pendukung/ pendorong** capaian indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Regulasi dan infrastruktur mendukung.
- c. **Faktor penghambat** Capaian Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- Perubahan Regulasi dipusat yang mengharuskan

penerapan ISO untuk Kerjasama Pemanfaatan data bagi OPD.

d. **Tindak lanjut** Capaian Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Terus melakukan Koordinasi secara intensif mengenai regulasi pemanfaatan dan pelayanan secara terintegrasi.

3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 88 realisasi sebesar 93,05 tercapai 105,73% atau bernilai kinerja sangat tinggi Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 92,2 atau tercapai sebesar 107%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 1,3% penurunan tidak berdampak terhadap hasil kinerja karena adanya peningkatan target, dan capaian untuk target 2024 telah terlampaui 5,73 %.

b. **Faktor pendukung/ pendorong** capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
- Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
- Adanya pelayanan secara jemput Bola

c. **Faktor penghambat** Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Adanya stigma negatif terhadap pelayanan yang lamban dan tidak efisien.

d. **Tindak lanjut** Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan ke masyarakat untuk merubah stigma negatif dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan.
4. Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 73% realisasi sebesar 92,08% tercapai 126% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 86% .atau tercapai sebesar191%, maka capaian tahun 2023 naik sebesar sebesar 6%.
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong** capaian indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
 - Adanya pelayanan secara jemput Bola
 - Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP)
 - c. **Faktor penghambat** Capaian Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
 - Kurang nya sumber daya Manusia dan anggaran untuk mendukung pelayanan online dan pelayanan jemput bola.
 - d. **Tindak lanjut** Capaian Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
 - Melakukan inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pelayanan.

23. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih terdapat penduduk yang tidak bisa mengakses kemudahan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan;	1. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang kemudahan mendapatkan pelayanan dan kepengurusan dokumen kependudukan; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan; 3. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menempati lahan- lahan illegal;

			4. Fasilitas kantor yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima bidang adminduk dan kurang mencerminkan responsive gender
		2. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi oleh instansi- instansi terkait sebagai <i>Single Identity Number</i> .	1. Penyediaan data dan informasi kependudukan oleh Disdukcapil masih dianggap sebagai upaya pemenuhan data tanpa memperhatikan validitasnya; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data kependudukan;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>3. Tidak dilakukannya pendataan secara berkala terhadap penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Dumai;</p> <p>4. Sarana dan prasarana yang tersedia tidak layak pakai (habis umur ekonomisnya)</p>
2.	Rendahnya kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan	<p>1. Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan;</p> <p>2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan dan sebagian besar sudah tidak layak pakai;</p> <p>3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan urusan pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>4. Tidak tersedianya Peraturan Daerah terbaru tentang Administrasi Kependudukan</p>

		<p>2. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan</p>	<p>Kurangnya pemantauan secara internal dari Instansi Terkait terhadap pelaksanaan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
--	--	---	---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Disdukcapil Kota Dumai memiliki 14 (empat belas) fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

9. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2024-2026 khususnya Misi Ke 4 (empat) “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*”. Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.4 diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Disdukcapil sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Telah diimplementasikannya sistem SIAK yang berbasis teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan public bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Updating database kependudukan dilakukan secara berkala.
 - d. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan;
 - e. Tersedianya ketentuan Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (UU, PP, Perpres, dan Permendagri);
 - f. Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan administrasi kependudukan (perda/perwa);
 - g. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima;
 - h. Tersedianya sumber daya di bidang teknologi informasi; dan
 - i. Meningkatnya kesadaran akan arti penting kerjasama pemanfaatan data dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Tantangan

- a. Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang layanan;
- c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;
- d. Belum optimalnya penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan;
- f. Lemahnya pengawasan internal terhadap kualitas layanan dan pengaduan masyarakat;
- g. Kebiasaan masyarakat yang belum tertib administrasi; dan
- h. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi Disdukcapil,, maka isu strategis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Dumai adalah **“Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” dan “Pemantapan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid”**.

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan:

1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi oleh instansi-instansi terkait sebagai Single Identity Number;
3. Kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
4. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi Disdukcapil,, maka isu strategis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Dumai adalah **“Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” dan “Pemantapan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid”**.

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan:

5. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan;
6. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi oleh instansi-instansi terkait sebagai Single Identity Number;
7. Kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
8. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan.

24. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2026 tersaji pada Tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada rancangan awal RKPD adalah sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan,
2. Pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah berjumlah Rp. 7.951.237.800,- berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2026 berjumlah Rp. 9.641.994.280,-

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2026

TABEL .T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

PROVINSI RIAU KOTA DUMAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
DUMAI

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				7.951.237.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				9.641.994.280	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.951.237.800	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.641.994.280	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.951.237.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.641.994.280	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	100%	7.256.237.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	100%	8.946.994.280	Pagu tidak Melebihi Renstra dan RPJMD

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2026

			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000,00	Sesuai
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	4.688.437.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	6.323.194.280,00	Terdapat Kekurangan Alokasi Gaji dan Tunjangan PNS / PPPK, dikarenakan ada penambahan PPPK melalui pengangkatan tenaga Honorer sebanyak 36 Orang
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	20.000.000	Sesuai
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	31 Orang	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	31 Orang	10.000.000	Sesuai
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.597.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.597.800.000	Sesuai
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	50.000.000	Sesuai
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	700.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	756.000.000	Adanya Kenaikan Standarisasi Gaji/Honor untuk tenaga TKPK
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 Unit	90.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 Unit	90.000.000	Sesuai

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2026

2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	88%	200.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	88%	200.000.000	Pagu tidak Melebihi Renstra dan RPJMD
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	20 jenis	100.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	20 jenis	100.000.000,00	Sesuai
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pendaftaran penduduk secara daring	7 jenis	100.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pendaftaran penduduk secara daring	7 Jenis	100.000.000	sesuai
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	88%	215.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	88%	215.000.000	Pagu tidak Melebihi Renstra dan RPJMD
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	23 Jenis	115.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	23 Jenis	115.000.000	Sesuai
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring		100.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring	4 Jenis	100.000.000	sesuai
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	94%	230.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	94%	230.000.000	Pagu tidak Melebihi Renstra dan RPJMD
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 OPD	115.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 OPD	115.000.000	sesuai
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendatangi perjanjian kerjasama	42 Lembaga	115.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendatangi perjanjian kerjasama	42 Lembaga	115.000.000	Sesuai
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	100%	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	100%	50.000.000	Pagu tidak Melebihi Renstra dan RPJMD
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Sesuai

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2026

							Semua Kel/Desa				
					7.951.237.800					9.641.994.280	

25. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD. Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2026 yang disampaikan pada saat Rembuk RT, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat (pokok pikiran DPRD), Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, sampai dengan Musrenbang RKPD di Tingkat Kota tidak ada yang ditujukan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Namun pada saat pembahasan Forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD di Tingkat Kota, terdapat beberapa hal terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang dipertanyakan masyarakat dan menjadi fokus pembahasan, diantaranya terkait dengan kemudahan-kemudahan mendapatkan pelayanan dan arti penting dokumen kependudukan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah terkait dengan layanan dasar maupun bantuan sosial.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2026 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2045. Visi pada RPJMN 2020-2026 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua” antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

RPJMN 2020-2026 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan diantaranya:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur;
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi;
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi.
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Indonesia 2045 menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2024-2026 yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan and menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mendukung terwujudnya agenda pembangunan kesatu “*Meningkatkan sumber daya manusia yang*

berkualitas dan berdaya saing” melalui program dan kegiatan prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif, dengan angka *dependency ratio* yang rendah. Perubahan struktur penduduk ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengalami bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas jika tersedia SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan Indonesia 2020-2026 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan mobilitas penduduk yang akurat, seimbang, dan memperhatikan pola kependudukan per wilayah (baik provinsi maupun kabupaten/kota). Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan “percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan *mobile positioning data* (MPD) menuju satu data kependudukan yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah serta perencanaan pembangunan berdasarkan

kondisi kependudukan melalui *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).”

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Disamping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni

Target nasional untuk terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan pada akhir tahun 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan kepemilikan NIK : 100%
2. Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-17 tahun : 100%
3. Persentase kepemilikan akte kematian : 100%
4. Persentase kepemilikan buku nikah : 100%
5. Persentase kepemilikan akta perceraian : 100%

Adapun arah kebijakan dan strategi yang direncanakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan diantaranya:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup:
 - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk termasuk WNI di luar negeri, melalui:

- pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
- b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, melalui:
- pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan
 - pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup:
- a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui:
- Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan
 - Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
- Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor;
 - Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah;

3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup:
 - a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
 - b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan
 - c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, sebagaimana yang tertuang di dalam Bab II subbab 2.3, maka dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai “**KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029**” sekaligus pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2024-2026 khususnya Misi keempat “*MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL*”, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dirumuskan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu “*Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid*” dan “*Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*”, dengan indikator “Ketersediaan database kependudukan yang valid” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial dengan indikator/tolak ukur persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi; dan

- b. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029	Misi-4 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL	<u>Tujuan</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berkualitas.	<u>Sasaran</u> Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. <u>Indikator:</u> Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)

Bab III - Tujuan dan Sasaran

			<p><u>Indikator:</u></p> <p>Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase).</p> <p>Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)</p> <p>Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)</p> <p>Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)</p>
--	--	--	---

Sumber: Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2025-2029, pencapaian SDG's, serta upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026 sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.2. Pada tahun 2026 terdapat 5 (lima) Program – 13 (tiga belas) Kegiatan – 32 (Tiga puluh dua) Subkegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. **9.174.014.525,-** bersumber dari APBD. Dari kelima program tersebut terdapat 4 (empat) program prioritas, diantaranya Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab III - Tujuan dan Sasaran

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						9.174.014.525,00								10.290.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.174.014.525,00							10.290.000.000,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.174.014.525,00							10.290.000.000,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-			-	8.479.014.525,00						-	9.390.000.000,00		
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	Indeks Keuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	8.479.014.525,00	-	-	-	-	-	-	9.390.000.000,00	-	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERE NCANAAN,PENGANGGARA N DAN EVALUASI KINERJA	-				7 DOKUMEN	100.000.000,00			Memperku a reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	9.040.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			1 Laporan 1 LAPORAN	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pentasausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			12 Bulan 12 BULAN	1.597.800.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	1.835.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	--			27 Unit	141.763.425,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	--	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	126.763.425,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100 99.15	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring	-			4 Jenis	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	230.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	230.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-

Bab III - Tujuan dan Sasaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Profil Kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang disajikan	-			1 Dokumen 1 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
J U M L A H								9.174.014.525,00							10.290.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung tercapainya program 3 (tiga) semester pertama Walikota/Wakil Walikota terpilih sekaligus mendukung terwujudnya Misi keempat “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*” RPJMD Kota Dumai Tahun 2024-2026, serta mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka pada Tabel 4.1 berikut terlampir Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang telah disesuaikan dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026.

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	9.040.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i> <i>Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>				1 Laporan 1 LAPORAN	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1							12 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	-			27 Unit	141.763.425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	126.763.425,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1							2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan															
			<i>Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>				12 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMASI TATA KELOLA 4. PENING KATAN KUALITAS PENYELE NGGARAA N PEMER NTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00		

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1		[Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil]	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100 99.15	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring</i>	-			4 Jenis	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA KATAJALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA KATAJALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	230.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan]	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	230.000.000,00	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan</i>				2 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Profil Kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	<i>Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang disajikan</i>	-			1 Dokumen 1 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
J U M L A H								9.174.014.525,00							10.290.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB V
BAB V

PENUTUP
PENUTUP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Renja tahun 2026 ini disusun bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025-2029. Sumber pendanaan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2026 bersumber dari APBD.

Dokumen Renja ini disusun mempedomani dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026. Dokumen Renja ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025-2029. Dokumen Renja ini mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 Walikota Dumai yang merupakan tahun pertama pada RPJMD Kota Dumai perodesasi 2025-2029. Tahun 2026 merupakan “Tahap Penataan” pada RPJMD 2025-2029 dengan arah kebijakan umum “KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029”. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung

pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Dumai Tahun 2026 “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL”. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pelaksanaannya lebih diutamakan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai, pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pencapaian prioritas nasional.

Tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab II Bagian Ketujuh “Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah”. Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Dumai, 18 September 2025



ZULHAFREN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19760117 200212 1 003

